JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Retorika Kehumasan Anggota DPR RI terhadap Isu Tunjangan Rumah di Media Sosial

Adhvidya Adhvidya[1)], Annisa Ratu[2)]

Universitas Pamulang, Indonesia

dosen03066@unpam.ac.id[1)]
annisaratu23@gmail.com[2)]

Submitted: 20/05/2026; Revised: 07/07/2026; Accepted: 30/10/2026; Published: 05/11/2026

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesalahan retorika dalam pernyataan anggota dewan berdasarkan teori retorika Aristoteles yang mencakup ethos (kredibilitas komunikator), pathos (daya emosional pesan), dan logos (argumentasi rasional), serta prinsip-prinsip komunikasi kehumasan dalam merespons kritik publik. Rumusan masalah difokuskan pada identifikasi elemen retoris yang tidak efektif dan analisis kaitannya terhadap konteks kehumasan. Metode yang digunakan adalah analisis isi kualitatif terhadap data digital berupa teks, video, audio, dan visual lain yang tersebar di media sosial. Analisis akan diarahkan untuk mengidentifikasi pola-pola retoris, tema dominan, serta representasi komunikasi verbal dan non-verbal yang muncul dalam respons anggota dewan. Kerangka teori yang digunakan menggabungkan pendekatan klasik Aristoteles dengan kajian kontemporer mengenai retorika kehumasan dan etika komunikasi publik. Penelitian ini menunjukkan bahwa respons anggota DPR terhadap isu tunjangan rumah memperlihatkan kegagalan pada retorika kehumasan yaitu runtuhnya kredibilitas komunikator karena ketidakpekaan sosial (ethos), kemudian ketiadaan empati saat merespon kekecewaan masyarakat (pathos), dan yang terakhir ketidaktepatan logika saat berargumentasi (logos).

Kata kunci: DPR, Etika Komunikasi Publik, Kehumasan, Media Digital, Retorika Aristoteles

Abstract

This study aims to examine rhetorical errors in the statements of these representatives based on Aristotle's Rhetorical Theory which includes Ethos (the credibility of the communicator), Pathos (the emotional appeal of the message), and Logos (the rational argumentation). The analysis also incorporates public relations principles for responding to public criticism. The problem formulation focuses on identifying ineffective rhetorical elements and analyzing their relations to the public relations context. The research utilizes qualitative content analysis of digital data including text, video, audio, and other visual assets circulating on social media. The analysis is directed toward identifying rhetorical patterns and dominant themes, representations of verbal and non-verbal communication in the members' responses. The theoretical framework combines Aristotelian classical approaches with contemporary studies on public relations rhetoric and public communication ethics. This study reveals that the response of House of Representatives members to the housing allowance issue demonstrates a failure in public relations rhetoric, a collapse of communicator credibility due to social insensitivity (ethos), a disappointing lack of empathy when responding to the public (pathos), and flawed logic in their arguments (logos).

***Key words**: DPR, Public Communication Ethics, Public Relations, Digital Media, Aristotle's Rhetorical Theory*

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

PENDAHULUAN

Pada pertengahan tahun 2025, tepatnya sekitar bulan Agustus 2025, Indonesia dikejutkan oleh gelombang demonstrasi besar yang melibatkan ribuan warga dari berbagai lapisan masyarakat. Aksi ini tidak hanya berlangsung di pusat-pusat kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tetapi juga menjalar ke daerah-daerah dengan intensitas yang mengejutkan. Massa turun ke jalan dengan membawa berbagai poster, spanduk, dan simbol digital yang menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan tunjangan rumah anggota DPR yang dianggap tidak masuk akal dan jauh dari rasa keadilan sosial. Fenomena ini menggambarkan salah satu bentuk nyata dari mobilisasi opini publik di era digital, ketika arus informasi dapat bergerak cepat, masif, dan melampaui batas demografis.

Fenomena ini mencuat setelah beredar luas data dan pernyataan di media digital yang mengungkap besaran tunjangan rumah serta fasilitas lain yang diterima oleh para wakil rakyat, termasuk tunjangan transportasi, komunikasi, dan representasi. Sejumlah media nasional melaporkan bahwa besaran tunjangan rumah anggota DPR—yang mencapai Rp50 juta per bulan—menjadi pemicu kemarahan publik di media sosial dimana menurut *polling* Kompastv di Instagram @kompastv tentang 'Tanggapan Soal DPR Dapat Tunjangan Rumah Rp. 50 Juta dan Beras Rp. 12 Juta' menghasilkan 87% warganet menanggapi tolak kebijakan tersebut, sementara 13% warganet menyatakan setuju atas kebijakan tersebut (Kompastv Jember, 2025: 21 Agustus). Dari kemarahan publik di berbagai media tersebut, akhirnya memunculkan gelombang demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus 2025 yang salah satunya menyuarakan tuntutan 'bubarkan DPR', sebagaimana diberitakan BBC.com (BBC, 2025: 25 Agustus). Ketimpangan kondisi ekonomi antara pejabat publik dengan masyarakat ini menimbulkan kesan ketidakadilan yang kuat, dan hal ini dibahas di media digital Youtube Kompastv yang menyoroti beberapa pernyataan masyarakat terkait dengan kondisi rumah mereka dibandingkan dengan isu tunjangan rumah anggota DPR (Kompastv, 2025: 26 Agustus). Dalam konteks ini, media sosial dan media digital sangat berperan sebagai pemantik penyebaran isu, hal ini karena media digital banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, media, jurnalis independen, hingga aktivis sosial untuk menyebarkan opini mereka yang mampu memperkuat persepsi bahwa kebijakan tunjangan rumah anggota DPR ini tidak berpihak kepada rakyat hingga kemudian memunculkan gerakan dan tuntutan 'bubarkan DPR' di media digital terutama sosial media sebagai reaksi dan ekspresi spontan kekecewaan dan kemarahan publik. Ini juga menunjukan kesadaran politik masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga legislatif. Hal ini menunjukan bagaimana media digital telah menjadi ruang bagi praktik komunikasi politik, pembentukan opini publik, dan praktik-praktik komunikasi kehumasan.

Sejumlah anggota dewan pun mulai memberikan tanggapan atas tuntutan "bubarkan DPR" yang ramai digaungkan di media sosial. Alih-alih meredam ketegangan dengan pendekatan retorika komunikatif yang empatik, dan persuasif disertai dengan klarifikasi yang mengedepankan etika, beberapa anggota justru melontarkan pernyataan yang dinilai publik sebagai pernyataan yang bersifat reaktif yang terkesan arogan, defensif atau pembenaran diri, dan tidak mencerminkan kesadaran akan krisis kepercayaan yang sedang berlangsung. Dalam situasi dimana masyarakat menuntut kejelasan dan empati, gaya komunikasi semacam itu justru memperkuat kesan jauhnya jarak antara rakyat dan wakil rakyat.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Salah satu di antaranya—anggota dewan—bahkan menyebut desakan 'bubarkan DPR' sebagai bentuk "mental orang tolol sedunia", dan menjadi salah satu contoh retorika yang menuai respons luas di media sosial (CNN Indonesia, 2025: Agustus 22). Lainnya menyebut bahwa tunjangan yang dipersoalkan justru dinilai sangat pantas dibandingkan harus merenovasi rumah dinas anggota DPR di Kalibata, dan justru menyalahkan masyarakat yang dianggap tidak senang melihat orang lain senang setelah masyarakat menganggap tunjangan rumah anggota DPR sebagai langkah yang nirempati, yang lantas menjadi sorotan publik dan memicu berbagai respons di media sosial (Kumparan, 2025: Agustus 20). Pernyataan-pernyataan tersebut tidak hanya memperkeruh suasana, tetapi juga memberikan persepsi bahwa anggota dewan tidak memiliki sensitivitas terhadap aspirasi rakyat sehingga menjadi bahan olok-olok dan kritik lanjutan di ruang digital dalam bentuk *meme*, parodi, hingga bahan edukasi politik oleh sejumlah komunitas digital. Jawaban dan pernyataan anggota dewan terhadap isu tunjangan rumah yang tidak hanya tercermin melalui pernyataan verbal di media, melainkan juga melalui perilaku dan komunikasi non-verbal yang turut membentuk persepsi publik. Gestur tubuh saat diwawancarai, ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksabaran atau sikap meremehkan, gerakan-gerakan tubuh, hingga pilihan gaya hidup yang dipertontonkan di ruang digital menjadi bagian dari pesan implisit yang ditangkap oleh masyarakat. Ketika anggota dewan tampak bersikap santai di tengah gelombang kritik, publik seolah menafsirkan hal tersebut sebagai bentuk ketidakpedulian dan jarak emosional terhadap realitas sosial. Bahkan ketidakhadiran dalam forum-forum diskusi publik atau penghindaran terhadap pertanyaan kritis dianggap sebagai bentuk komunikasi yang menyampaikan pesan tertentu. Dalam era visual dan digital seperti sekarang, komunikasi non-verbal memiliki daya resonansi yang tinggi, karena publik tidak hanya mendengar apa yang dikatakan, tetapi juga mengamati bagaimana hal itu disampaikan dan dalam konteks apa.

Sehingga dari hal ini, memperlihatkan kegagalan fungsi komunikasi kehumasan di lembaga politik. Sebagai institusi publik, DPR seharusnya bertanggungjawab dalam menjaga citra positif dalam membangun hubungan dengan masyarakat. Dalam perspektif kehumasan, setiap pernyataan pejabat publik merupakan pesan yang memiliki implikasi terhadap reputasi lembaga di mata publik. Ketika pesan yang disampaikan ternyata tidak memperhatikan aspek etika komunikasi dan konteks sosial, maka kredibiltas lembaga dapat menurun. Hal tersebut seperti pembahasan pada jurnal berjudul Positive and Negative Politeness Strategies Used by Kenya's Members of National Assembly, dimana strategi kesantunan positif dan negatif digunakan oleh anggota Majelis Nasional Kenya untuk mengurangi ketegangan dan menghindari gesekan emosional pada rapat dewan, sehingga interaksi dan komunikasi yang terjadi antara anggota Majelis Nasional Kenya dengan publik dapat berjalan produktif, persuasif, dan menimbulkan perasaan saling dihargai dan dilibatkan (Njuki, dkk, 2021). Selain itu dari sisi retorika, pada jurnal berjudul Retorika Deliberative: Komunikasi Marah-marah Pejabat Publik juga dibahas retorika deliberatif pada pejabat publik di Indonesia yaitu Basuki Tjahya Purnama (Ahok) dan Tri Rismaharini dimana dibahas bagaimana retorika deliberatif dengan komunikasi marah-marah ini dapat membujuk audiens untuk mengambil atau menolak tindakan tertentu dengan mempertimbangkan untung-rugi di masa depan, ini dilihat dari sisi audiens yang mempertimbangkan *ethos*, *pathos*, dan *logos* komunikator (Amrihani, 2021). Dari kedua

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

penelitian tersebut sudah cukup membahas bagaimana aspek-aspek retorika bisa membentuk emosional publik serta membantu publik mengambil keputusan tertentu, namun pembahasan mengenai aspek-aspek retorika terkait pesan spesifik pejabat publik ini belum dibahas secara terperinci dari masing-masing aspek *ethos*, *pathos*, dan *logos*, sehingga penelitian ini berusaha untuk mengangkat beberapa pesan spesifik dari sisi komunikator lima anggota DPR yaitu tentang Isu Tunjangan Rumah dikaitkan dengan aspek-aspek retorika dan prinsip kehumasan, dimana prinsip kehumasan ini belum dibahas dalam kedua penelitian tersebut.

Dalam konteks retorika, anggota dewan tidak lagi berdiri sebagai alat persuasi, namun justru seolah menjadi indikator jarak antara institusi politik dan masyarakat yang semakin melek media. Ketika respons yang diberikan justru memperlihatkan ketidaksiapan menghadapi kritik terbuka, publik pun semakin aktif mengonstruksi narasi tandingan yang menantang legitimasi komunikasi politik formal. Menurut Aristoteles (2007), efektivitas retorika ditentukan oleh tiga unsur utama, yaitu *ethos* (kredibilitas komunikator), *pathos* (daya emosional pesan), dan *logos* (argumentasi rasional). Dalam konteks kasus ini, para anggota DPR tampak gagal memanfaatkan ketiga unsur retorika tersebut dengan seimbang. Dilihat dari perilaku dan retorika mereka, DPR terkesan lebih menonjolkan unsur *logos* berupa pembenaran prosedural, tetapi mengabaikan *pathos* yang seharusnya menyentuh sisi emosional masyarakat, dan *ethos* yang tidak mampu diraih anggota DPR karena citra arogan yang terbentuk akibat kurangnya empati kepada masyarakat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam era digital, retorika kehumasan bukan sekadar soal penyampaian pesan, tetapi juga soal bagaimana institusi politik memahami dan merespons dinamika opini publik yang terus bergerak. Hal ini lantas menimbulkan pertanyaan, bagaimana seharusnya anggota dewan merespon segala hal yang terkait dengan mereka. Sejalan dengan uraian tersebut, peneliti lantas melihat ini sebagai fenomena yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, dan tertarik untuk mengambil judul "Retorika Kehumasan Anggota DPR RI terhadap Isu Tunjangan Rumah di Media Sosial".

Meskipun isu ini telah banyak dibahas dalam pemberitaan, opini publik, dan kajian komunikasi politik, belum ada penelitian yang secara khusus menganalisis respons anggota DPR menggunakan kerangka retorika Aristoteles dan prinsip kehumasan. Sebagian besar kajian sebelumnya berfokus pada persepsi publik, *framing* media, atau aspek politik, sehingga aspek kesalahan retorika dalam konteks komunikasi publik institusional masih menjadi celah penelitian yang belum terisi. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan ini digunakan dalam penelitian ini karena peneliti berupaya mengungkap secara mendalam praktik retorika yang digunakan oleh anggota dewan dalam konteks kehumasan, khususnya saat merespons isu-isu publik yang viral. Retorika yang disampaikan kepada masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi publik serta menjaga hubungan antara institusi politik dan masyarakat. Fenomena ini tampak dalam berbagai pernyataan publik anggota dewan, di mana kualitas

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

retorika yang digunakan berpengaruh terhadap tingkat penerimaan, kepercayaan, dan legitimasi lembaga legislatif di mata publik.

Teori ini dipadukan dengan metode analisis data model Miles dan Huberman, dimana model analisis ini terdiri dari tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses merangkum, memilih informasi yang relevan, memfokuskan pada aspek penting, serta mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data. Tahap kedua adalah penyajian data, yang dalam penelitian kualitatif dilakukan secara naratif untuk memperoleh pemahaman terhadap fenomena yang diteliti dan merumuskan langkah tindak lanjut berdasarkan temuan tersebut. Tahap ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, yang dilakukan setelah seluruh data lapangan terkumpul (Pujileksono, 2016). Kesimpulan dalam penelitian kualitatif disusun dalam bentuk deskriptif, dengan tujuan memperjelas gambaran yang sebelumnya belum terdefinisi secara eksplisit.

Penelitian ini berlandaskan pada teori retorika Aristoteles yang digunakan untuk memahami strategi komunikasi anggota dewan dalam merespons isu publik. Subjek penelitian ini adalah anggota DPR RI yang memberikan pernyataan publik terkait isu tunjangan rumah pada Agustus 2025. Pemilihan subjek didasarkan pada visibilitas tinggi mereka di media digital, posisi strategis sebagai komunikator institusional, serta dampak langsung pernyataan mereka terhadap persepsi publik dan citra lembaga legislatif. Objek pada penelitian ini adalah fenomena retorika yang digunakan oleh anggota dewan dalam merespons isu publik, khususnya isu tunjangan rumah dan seruan ‘bubarkan DPR’. Retorika yang disampaikan kepada masyarakat akan dianalisis sebagai bentuk komunikasi institusional yang mencerminkan hubungan antara anggota dewan dan publiknya. Fokus penelitian terletak pada bagaimana retorika tersebut muncul dalam pernyataan publik, bagaimana retorika itu berperan dalam membentuk persepsi, menjaga pengertian bersama, hingga bagaimana seharusnya retorika tersebut disampaikan agar dapat memengaruhi dinamika opini masyarakat terhadap lembaga legislatif. Objek penelitian bukan hanya pada isi retorika, tetapi juga pada fungsi komunikatifnya dalam konteks kehumasan politik.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi tidak langsung, yaitu teknik observasi di mana Peneliti menggunakan rekaman video, arsip digital, atau dokumentasi lain sebagai sumber observasi (Abdussamad, 2021). Observasi dilakukan terhadap rekaman pernyataan anggota dewan yang tersebar di media sosial, termasuk video, kutipan digital, dan unggahan lainnya yang berkaitan dengan isu tunjangan rumah dan seruan “bubarkan DPR”. Melalui observasi ini, peneliti mengamati secara utuh bentuk retorika yang digunakan, konteks penyampaiannya, serta respons publik yang muncul sebagai bagian dari dinamika komunikasi kehumasan politik. Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen dimana jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa bukti-bukti digital yang relevan dengan pernyataan anggota dewan, khususnya yang tersebar melalui media sosial dan artikel daring. Dokumen tersebut mencakup rekaman video, kutipan teks, unggahan media sosial, serta liputan berita *online* yang memuat respons anggota dewan terhadap isu tunjangan rumah dan seruan “bubarkan DPR”. Selain itu, dokumentasi berupa tangkapan layar konten viral dan komentar publik juga digunakan untuk memahami dinamika penyebaran retorika dan resepsi masyarakat terhadapnya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi kualitatif

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

yang dipadukan dengan kerangka retorika Aristoteles serta prinsip-prinsip retorika kehumasan. Seluruh data digital yang diperoleh melalui observasi media sosial dan studi dokumen dianalisis secara bertahap mengikuti model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi, menyaring, dan mengelompokkan berbagai bentuk data seperti potongan video, caption, pernyataan media, unggahan Instagram, serta ekspresi non-verbal yang tampak dalam konten digital. Dalam penelitian ini, proses pengodean data dilakukan dengan menggunakan kerangka retorika Aristoteles yang telah diadaptasi dalam kajian komunikasi dan Public Relations. Berikut indikator *ethos, pathos,* dan *logos*, yang diteliti terkait dengan konteks komunikasi digital anggota DPR:

Tabel 1. Indikator Retorika dan Konteks Komunikasi Digital Anggota DPR

Indikator Retorika	**Aspek yang Diamati**	**Operasional Indikator**
Ethos	Kredibilitas, karakter, dan integritas komunikator yang tercermin melalui sikap, pilihan kata, dan cara penyampaian pesan.	Diidentifikasi melalui penyebutan jabatan, pengalaman, kompetensi, rekam jejak, atau penggunaan otoritas sebagai anggota DPR untuk mendukung kredibilitas pernyataan.
Pathos	Kemampuan komunikator membangkitkan atau merespons emosi publik, termasuk empati, sensitivitas sosial, dan kesadaran terhadap situasi krisis.	Diidentifikasi melalui penggunaan bahasa emosional, ekspresi empati atau kemarahan, narasi yang membangkitkan simpati, serta ajakan yang diarahkan pada respons emosional khalayak.
Logos	Argumentasi rasional, koherensi logis, dan penggunaan bukti atau penalaran dalam membangun pesan	Diidentifikasi melalui penyampaian data, fakta, bukti, alasan, hubungan sebab-akibat, atau penalaran yang digunakan untuk mendukung klaim atau argumen.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan memilih lima anggota DPR RI, yaitu Nafa Urbach, Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio. Kelima figur dipilih karena pernyataan mereka terkait isu tunjangan rumah anggota DPR pada Agustus–September 2025 memperoleh eksposur luas di media digital, memicu respons publik berupa kritik, meme, parodi, dan diskusi lanjutan, serta direproduksi melalui berbagai kanal media. Pemilihan tersebut didasarkan pada tingkat viralitas dan relevansi pernyataan mereka terhadap fenomena yang diteliti.

Adapun keabsahan interpretasi data dijaga melalui pengecekan data secara berulang, perbandingan antartemuan, dan triangulasi sumber serta teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan pernyataan anggota DPR yang diperoleh dari berbagai sumber digital, seperti rekaman video, unggahan media sosial, kutipan berita daring, dan dokumentasi digital lainnya. Untuk memeriksa keakuratan pernyataan, kutipan dan potongan video yang beredar juga dibandingkan dengan rekaman aslinya guna mengidentifikasi kemungkinan distorsi akibat penyuntingan atau pembingkaian ulang. Selain itu, diskusi dengan anggota tim penelitian dilakukan untuk menjaga objektivitas dan ketepatan interpretasi berdasarkan kerangka retorika yang digunakan.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data penelitian ini berupa pernyataan verbal dan nonverbal lima anggota DPR RI terkait isu tunjangan rumah pada periode Agustus–September 2025, yang diperoleh melalui rekaman video, unggahan media sosial, dan pemberitaan media daring. Kelima tokoh tersebut adalah Nafa Urbach, Adies Kadir, Ahmad Sahroni, Surya Utama (Uya Kuya), dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio). Mereka dipilih secara purposif karena pernyataan atau konten mereka memperoleh eksposur luas di media digital, memicu respons publik, serta relevan untuk dianalisis menggunakan kerangka retorika Aristoteles (*ethos, pathos,* dan *logos*) dalam konteks komunikasi kehumasan.

Untuk mengidentifikasi pola retorika yang muncul dalam pernyataan kelima anggota DPR RI, temuan penelitian dipetakan berdasarkan tiga dimensi retorika Aristoteles, yaitu *ethos*, *pathos*, dan *logos*. Pemetaan ini bertujuan untuk memperlihatkan karakteristik retorika masing-masing tokoh, sekaligus mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam membangun kredibilitas, merespons emosi publik, serta menyusun argumentasi terkait isu tunjangan rumah. Ringkasan temuan tersebut disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Sintesis Analisis Retorika Lima Anggota DPR RI Berdasarkan Indikator Operasional

Tokoh	Ethos	Pathos	Logos
Nafa Urbach	Pengalaman pribadi sebagai anggota DPR mengenai kemacetan.	Narasi kemacetan untuk membangun pemahaman, tetapi kurang menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi masyarakat.	Pengalaman pribadi sebagai alasan kebutuhan tunjangan tanpa dukungan data yang memadai.
Adies Kadir	Penjelasan biaya kos sebagai dasar pembenaran tunjangan untuk DPR.	Gaya santai dan saran mencari kos murah yang kurang sensitif terhadap keresahan ekonomi masyarakat.	Kesalahan perhitungan biaya kos dan kesimpulan bahwa anggota DPR masih harus menambah biaya sendiri.
Ahmad Sahroni	Jabatan sebagai anggota DPR dan argumen tentang keberlangsungan pemerintahan.	Ungkapan konfrontatif terhadap pengkritik yang tidak menunjukkan empati.	Argumen mengenai konsekuensi pembubaran DPR tanpa dukungan penjelasan yang memadai.
Uya Kuya	Penyebutan identitas sebagai anggota DPR sekaligus artis.	Bahasa informal dan gaya santai yang kurang selaras dengan keseriusan kritik publik.	Generalisasi bahwa semua orang membuat konten untuk menormalisasi aktivitas tersebut.
Eko Patrio	Persona selebritas melalui parodi dan joget, yang lebih menonjolkan identitas hiburan daripada tanggung jawab legislatif.	Humor, parodi, dan gestur berjoget yang berpotensi dipersepsikan meremehkan keresahan publik.	Konten hiburan tanpa argumentasi substantif untuk menjawab kritik mengenai profesionalisme anggota DPR.

Analisis Ethos, Pathos, Logos dalam Pernyataan Anggota DPR RI

a. Nafa Urbach

"...tidak dapat rumah jabatan, dikarenakan banyak sekali anggota dewan yang dari luar kota, maka dari itu banyak sekali anggota dewan yang kontrak di dekat Senayan supaya

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

memudahkan mereka untuk ke kantor DPR. Saya saja yang tinggalnya di Bintaro itu macetnya luar biasa rumahnya, ini saja sudah setengah jam di perjalanan masih macet." (Intens Investigasi, 2025, 1 September)

Analisis *Ethos*: Dalam aspek *ethos*, kredibilitas Nafa Urbach berkaitan dengan legitimasi formalnya sebagai anggota DPR RI dan cara ia membangun kredibilitas melalui pernyataan publik. Dalam kutipan tersebut, Nafa menjelaskan kebutuhan tempat tinggal anggota DPR dari luar kota serta mengemukakan pengalaman pribadinya menghadapi kemacetan dari Bintaro menuju Senayan. Namun, *penjelasan tersebut lebih bertumpu pada pengalaman personal daripada penjabaran kompetensi atau otoritasnya* dalam menjelaskan kebijakan tunjangan rumah. Dalam konteks kontroversi yang diteliti, pendekatan tersebut berisiko memperkuat persepsi bahwa pernyataannya berorientasi pada pembelaan terhadap kebutuhan anggota DPR, bukan pada penjelasan kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan publik.

Analisis *Pathos*. Pada aspek *pathos*, Nafa menggunakan narasi personal tentang kemacetan untuk menggambarkan kesulitan perjalanan menuju kantor DPR. Narasi tersebut berpotensi membangun simpati terhadap kebutuhan tempat tinggal yang lebih dekat dengan tempat kerja. Namun, strategi ini dapat kehilangan daya persuasif ketika *pengalaman yang disampaikan tidak menunjukkan sensitivitas terhadap perbedaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat* yang juga menghadapi kemacetan.

Analisis *Logos*. Dari aspek *logos*, argumen Nafa dapat direkonstruksi melalui beberapa premis: *anggota DPR tidak memperoleh rumah jabatan*; *sebagian anggota DPR berasal dari luar kota dan menyewa tempat tinggal di sekitar Senayan*; serta Nafa sendiri *mengalami kemacetan ketika melakukan perjalanan dari Bintaro*. Rangkaian alasan tersebut digunakan untuk menjelaskan kebutuhan tempat tinggal yang dekat dengan kantor DPR. Akan tetapi, *pengalaman kemacetan pribadi tidak dengan sendirinya membuktikan kebutuhan tunjangan rumah bagi anggota DPR secara umum*. Pernyataan tersebut juga belum disertai data yang memadai untuk menunjukkan cakupan kebutuhan tempat tinggal anggota DPR dan hubungan langsung antara pengalaman kemacetan dengan urgensi pemberian tunjangan. Kelemahan argumentasinya terletak pada keterbatasan bukti dan generalisasi dari pengalaman individual untuk mendukung pembenaran kebijakan yang berlaku bagi kelompok yang lebih luas.

b. Adies Kadir

"...Itu kalau kita… kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kost kan tiga juta per bulan, didapatkan lima puluh juta per bulan. Kalau kita tiga juta kita kalikan dua puluh enam hari kerja berarti tujuh puluh delapan juta per bulan, padahal yang didapat cuma sekitar lima puluh juta per bulan. Nah berarti mereka masih nombok lagi. Nah, nanti kita pikirkan, kalau memang masih dikira itu lima puluh juta itu masih terlalu besar, nah, teman-teman kita imbau untuk cari kostan kira-kira yang satu jutaan, mungkin yang kamar mandinya di luar gitu ya. Kalau memang masih dianggap… masih terlalu mahal kost-kostannya." (CNN Indonesia, 2025, 20 Agustus)

Analisis *Ethos*. Dalam aspek *ethos*, Adies Kadir memiliki legitimasi formal sebagai

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

pimpinan DPR RI. Namun, kredibilitas retorisnya dalam pernyataan tersebut berkaitan dengan ketepatan informasi dan cara menyampaikan argumen. Penjelasannya mengenai biaya kos yang dikalikan dengan jumlah hari kerja menimbulkan persoalan ketepatan perhitungan, sehingga memengaruhi persepsi terhadap kompetensinya dalam menjelaskan tunjangan rumah. Selain itu, *anjuran agar anggota DPR mencari kos dengan harga sekitar satu juta rupiah, termasuk yang kamar mandinya berada di luar, dapat dipersepsikan sebagai respons defensif karena tidak secara langsung menjawab substansi kritik publik mengenai tunjangan rumah.*

Analisis *Pathos*. Pada aspek *pathos*, *Adies menggambarkan anggota DPR sebagai pihak yang masih harus menanggung kekurangan biaya tempat tinggal*. Narasi tersebut berupaya membangun pemahaman terhadap kebutuhan anggota DPR, tetapi berhadapan dengan konteks keresahan masyarakat mengenai kondisi ekonomi dan besaran tunjangan. Ditambah dengan gaya bicara informal dan ekspresi dalam penyampaian pernyataannya, pesan tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai kurang sensitif terhadap persoalan yang sedang diperdebatkan. Respons digital berupa kritik dan meme, sebagaimana didokumentasikan dalam penelitian, menunjukkan bahwa pernyataan tersebut menjadi bagian dari perbincangan publik yang lebih luas.

Analisis *Logos*. Dari aspek *logos*, Adies berusaha membangun argumen bahwa tunjangan rumah sekitar Rp50 juta per bulan belum mencukupi kebutuhan tempat tinggal anggota DPR. Ia mendasarkan klaim tersebut pada biaya kos sekitar Rp3 juta per bulan yang dikalikan dengan 26 hari kerja, sehingga menghasilkan angka Rp78 juta per bulan. *Namun, perhitungan ini keliru karena biaya kos yang disebutkan sudah merupakan biaya bulanan, bukan biaya harian.* Kesimpulan bahwa anggota DPR masih harus menambah biaya sendiri dengan demikian tidak didukung oleh perhitungan yang tepat. Pada akhirnya kekeliruan tersebut memperlihatkan kelemahan penalaran dalam penggunaan angka sebagai bukti untuk membenarkan klaim mengenai besaran tunjangan rumah.

c. Ahmad Sahroni

"Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalankan pemerintahan yang sekarang ini? Silakan kritik mau ngapain aja boleh, tapi jangan berlebihan itu karena merusak mental. Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia." (Tempo, 2025, 25 Agustus).

Analisis Ethos. Dalam aspek *ethos*, Ahmad Sahroni memiliki legitimasi formal sebagai anggota DPR RI sekaligus identitas profesional sebagai pengusaha. Namun, legitimasi formal tersebut tidak serta-merta menjamin kredibilitas retoris dalam menyampaikan tanggapan kepada publik. *Penggunaan ungkapan seperti "mental orang tertolol sedunia" dan penyebutan pengkritik sebagai "orang tolol sedunia" cenderung melemahkan persepsi terhadap karakter dan integritas komunikator*. Alih-alih memperlihatkan keterbukaan terhadap kritik, pilihan kata tersebut dapat dipersepsikan sebagai sikap defensif dan merendahkan masyarakat. Pertanyaan mengenai kemampuan masyarakat menjalankan pemerintahan apabila DPR dibubarkan juga berpotensi menampilkan posisi komunikator yang seolah-olah menempatkan lembaga legislatif sebagai pihak yang tidak dapat

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

dipisahkan dari keberlangsungan pemerintahan, *tanpa menjelaskan lebih lanjut dasar argumentasinya.*

Analisis Pathos. Pada aspek *pathos*, pernyataan *Sahroni menggunakan bahasa konfrontatif yang berpotensi membangkitkan kemarahan dan memperbesar ketegangan emosional antara wakil rakyat dan masyarakat*. Dalam situasi ketika publik menyampaikan kritik terhadap DPR, penggunaan kata-kata yang menghina pengkritik dapat dipersepsikan sebagai bentuk penolakan terhadap aspirasi masyarakat, bukan sebagai upaya memahami keresahan yang mendasarinya. Dari sinilah, muncul ketidaksesuaian antara harapan publik untuk memperoleh tanggapan substantif dan respons yang justru menonjolkan kecaman personal. *Diksi yang merendahkan tersebut cenderung memperlebar jarak emosional antara komunikator dan khalayak* serta memperkuat persepsi negatif terhadap cara anggota DPR merespons kritik.

Analisis Logos. Dari aspek *logos*, Sahroni mengajukan pertanyaan retoris mengenai apakah pembubaran DPR akan menjamin masyarakat mampu menjalankan pemerintahan. Pertanyaan tersebut membingkai tuntutan pembubaran DPR sebagai persoalan yang berpotensi mengganggu keberlangsungan pemerintahan. Namun, *pernyataan tersebut tidak disertai penjelasan yang memadai mengenai hubungan antara tuntutan pembubaran DPR dan ketidakmampuan masyarakat menjalankan pemerintahan*. Selain itu, penyebutan pengkritik sebagai "orang tolol sedunia" tidak didukung oleh bukti atau penalaran yang relevan untuk membantah substansi kritik mereka. Kelemahan logos dalam pernyataan ini terletak pada hubungan argumentasi yang tidak dijelaskan secara memadai serta penggunaan penilaian personal sebagai pengganti alasan substantif. Argumen tersebut lebih menekankan kecaman terhadap pihak yang mengkritik daripada memberikan penjelasan logis mengenai persoalan yang diperdebatkan.

d. Surya Utama (Uya Kuya)

"Lah emang kita artis. Kita DPR tapi kita artis. Gue tanya sekarang, emang ada anggota DPR yang gak ngonten? Ada? Semua ngonten, artis ngonten, netizen juga ngonten."
(Telusuk.id, 2025, 20 Agustus).

Analisis Ethos. Dalam aspek *ethos*, Surya Utama, yang dikenal dengan nama panggung Uya Kuya, menampilkan identitas ganda sebagai anggota DPR RI dan selebritas. Pernyataannya, "Kita DPR tapi kita artis", memperlihatkan upaya menempatkan identitas legislatif berdampingan dengan identitas dalam budaya populer. Penggunaan bahasa kasual dan gaya komunikasi yang akrab dapat membangun kedekatan dengan khalayak. Namun, dalam konteks kritik terhadap perilaku anggota DPR, *penonjolan identitas selebritas tersebut cenderung melemahkan persepsi mengenai profesionalitas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik*. Dengan menekankan bahwa anggota DPR juga merupakan artis, Surya berisiko mengaburkan perbedaan antara aktivitas sebagai figur hiburan dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

Analisis Pathos. Pada aspek *pathos*, Surya menggunakan bahasa sehari-hari dan pertanyaan retoris, seperti *"emang ada anggota DPR yang gak ngonten?"*, untuk membangun suasana percakapan yang informal dan akrab. Gaya tersebut berpotensi membuat pesan terasa dekat dengan pengalaman khalayak yang terbiasa menggunakan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

media sosial. Akan tetapi, *konteks penyampaian pernyataan ini berkaitan dengan kritik publik terhadap konten joget di gedung MPR yang menjadi perhatian di tengah perdebatan mengenai tunjangan rumah anggota DPR, yang justru dipersepsikan sebagai upaya menyepelekan persoalan yang dipertanyakan.* Penyamaan aktivitas anggota DPR dengan aktivitas artis dan netizen juga dapat menimbulkan kesan bahwa kritik publik tidak memperoleh tanggapan yang memadai.

Analisis Logos. Dari aspek *logos*, Surya membangun *penalaran melalui generalisasi bahwa aktivitas membuat konten merupakan hal yang umum dilakukan oleh anggota DPR*, artis, maupun netizen. Pernyataan "*Semua ngonten*" digunakan untuk menegaskan kelaziman aktivitas tersebut. Namun, kelaziman suatu perilaku tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa perilaku tersebut tepat dalam setiap konteks atau terbebas dari kritik. Argumen Surya juga menyamakan aktivitas pembuatan konten oleh kelompok yang memiliki peran dan tanggung jawab berbeda, tanpa menjelaskan bagaimana aktivitas tersebut berkaitan dengan kewajiban anggota DPR sebagai pejabat publik.

e. Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio)

"Biar jogetnya lebih keren pake sound ini aja." (Antara News, 2025, 22 Agustus).

Analisis Ethos. Dalam aspek *ethos*, Eko Hendro Purnomo, yang dikenal dengan nama panggung Eko Patrio, menampilkan identitas sebagai anggota DPR RI sekaligus selebritas melalui komunikasi berbasis performativitas visual. Video parodi DJ *sound horeg* dengan caption "Biar jogetnya lebih keren pake sound ini aja" menonjolkan persona yang humoris dan santai. Namun, *dalam konteks kritik publik terhadap aksi joget anggota DPR di gedung MPR, pendekatan tersebut cenderung melemahkan persepsi mengenai profesionalitas dan tanggung jawabnya sebagai pejabat publik*. Alih-alih memperlihatkan pertimbangan terhadap sensitivitas isu yang sedang diperdebatkan, respons melalui parodi justru lebih menonjolkan persona penghibur. Hal ini memperlihatkan ketegangan antara identitas Eko sebagai selebritas dan ekspektasi publik terhadap perilaku serta integritas seorang wakil rakyat.

Analisis Pathos. Pada aspek *pathos*, Eko menggunakan komunikasi nonverbal berupa gestur berjoget serta komunikasi verbal melalui caption bernada humor. Pendekatan tersebut dapat dipahami sebagai penggunaan hiburan untuk merespons situasi yang menjadi perhatian publik. Namun, strategi ini berpotensi tidak selaras dengan kondisi emosional khalayak yang sedang mengkritisi perilaku anggota DPR dan mengaitkannya dengan perdebatan mengenai tunjangan rumah. Caption yang mengajak agar joget dilakukan dengan lebih keren *tidak menunjukkan pengakuan terhadap keresahan yang mendasari kritik tersebut*. Akibatnya, humor yang digunakan cenderung dipersepsikan sebagai sikap meremehkan persoalan. Ketidaksesuaian antara nada pesan yang ringan dan konteks kritik yang serius tersebut juga memperkuat persepsi negatif terhadap kepekaan Eko dalam merespons emosi publik.

Analisis Logos. Dari aspek *logos*, komunikasi Eko tidak menampilkan argumentasi verbal yang secara langsung menjawab substansi kritik publik. Caption "*Biar jogetnya lebih keren pake sound ini aja"* mengarahkan perhatian pada aspek hiburan dan penampilan, bukan pada persoalan profesionalitas serta kepantasan perilaku anggota

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

DPR yang dipersoalkan. *Respons tersebut tidak menyediakan alasan, penjelasan, atau bukti yang dapat digunakan untuk menanggapi kritik masyarakat*. Kelemahan logos dalam komunikasi ini terletak pada pengalihan perhatian dari substansi persoalan menuju parodi hiburan. Dimana strategi tersebut tidak membangun penalaran yang relevan untuk menjawab kritik, sehingga persoalan mengenai tanggung jawab dan sensitivitas moral pejabat publik tetap tidak terjawab.

Analisis Retorika dalam Konteks Kehumasan

a. Pola Kelemahan Ethos dalam Konteks Kehumasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa legitimasi formal sebagai anggota DPR RI tidak selalu diikuti oleh kredibilitas retoris dalam merespons kritik publik. Nafa Urbach, Surya Utama, dan Eko Patrio lebih menonjolkan identitas selebritas melalui pengalaman personal, normalisasi aktivitas membuat konten, serta humor dan parodi. Sementara itu, Adies Kadir melemahkan argumentasinya melalui kekeliruan perhitungan biaya tempat tinggal, sedangkan Ahmad Sahroni menggunakan diksi konfrontatif yang menyerang pengkritik. Perbedaan tersebut memperlihatkan persoalan yang sama, yaitu ketidaksesuaian antara cara pesan disampaikan dan ekspektasi publik terhadap kredibilitas, integritas, serta tanggung jawab sebagai wakil rakyat.

b. Pola Kelemahan Pathos dalam Konteks Kehumasan

Pada aspek *pathos*, kelima kasus menunjukkan ketidaksesuaian antara gaya komunikasi anggota DPR dan keresahan yang mendasari kritik masyarakat. Sebagian menggunakan nada santai, humor, atau pengalaman personal, sedangkan Ahmad Sahroni merespons dengan ungkapan konfrontatif. Respons tersebut berpotensi dipersepsikan sebagai pembelaan diri, sikap meremehkan, atau penolakan terhadap aspirasi publik.

c. Pola Kelemahan Logos dalam Konteks Kehumasan

Analisis *logos* menunjukkan bahwa kelemahan argumentasi anggota DPR RI tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan data, tetapi juga dengan relevansi premis, ketepatan penalaran, dan kesesuaian respons dengan inti kritik publik. Penjelasan mengenai kebutuhan tempat tinggal, biaya kos, serta kelaziman membuat konten digunakan untuk membenarkan posisi masing-masing, tetapi tidak selalu cukup untuk mendukung klaim yang disampaikan. Hal ini terlihat pada kekeliruan perhitungan biaya kos oleh Adies Kadir, yang melemahkan hubungan antara dasar argumen dan kesimpulannya. Sementara itu, pernyataan Surya Utama bahwa semua orang membuat konten menunjukkan generalisasi yang tidak dengan sendirinya membenarkan perilaku anggota DPR dalam konteks tanggung jawab legislatif. Penyamaan anggota DPR dengan artis dan netizen juga mengabaikan perbedaan tanggung jawab institusional, sedangkan penghinaan terhadap pengkritik tidak menjawab substansi kritik yang disampaikan. Temuan ini membuktikan bahwa kekuatan argument harus mempertimbangkan relevansi dan ketepatan penalaran yang menghubungkannya dengan kesimpulan.

Dalam konteks kehumasan, kelemahan tersebut semakin terlihat ketika respons pejabat publik tidak menjawab kebutuhan informasi masyarakat atau tidak disertai penjelasan yang memadai dan dapat diverifikasi. Kondisi ini berkaitan dengan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi (Silviani, 2020). Selain itu, komunikasi pejabat publik berlangsung dalam lingkungan digital yang memungkinkan

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

pernyataan disebarluaskan, dikritik, dan diparodikan dengan cepat. Karena itu, penyusunan respons perlu mempertimbangkan konteks persoalan, kebutuhan informasi publik, serta kemungkinan interpretasi khalayak. Pertimbangan tersebut dapat dikaitkan dengan tahapan manajemen PR menurut Cutlip, Center, dan Broom (2011), mulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi komunikasi, agar penalaran yang tepat serta informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Retorika Kehumasan atas Pernyataan Anggota DPR RI

Hasil analisis menunjukkan bahwa persoalan retorika dalam kontroversi tunjangan rumah tidak hanya berkaitan dengan gaya komunikasi individu, tetapi juga berimplikasi terhadap citra institusi. Kelemahan *ethos* tampak pada ketidaksesuaian antara komunikasi yang disampaikan dan ekspektasi publik terhadap kredibilitas serta integritas pejabat. Kelemahan *pathos* terlihat dari kurangnya sensitivitas terhadap keresahan masyarakat, sedangkan kelemahan *logos* tercermin dalam argumentasi yang tidak relevan, perhitungan keliru, generalisasi, dan penjelasan yang tidak memadai.

Temuan tersebut menegaskan pentingnya prinsip empati, tanggung jawab, transparansi, dan responsivitas dalam komunikasi kehumasan (Silviani, 2020). Empati diperlukan untuk memahami keresahan publik; tanggung jawab menuntut pertimbangan terhadap kewajiban pejabat; transparansi mengharuskan penyampaian informasi yang jelas dan akurat; sedangkan responsivitas menuntut jawaban yang relevan terhadap persoalan yang diperdebatkan.

Selain itu, ketidaksesuaian antara pesan verbal maupun nonverbal dan konteks persoalan menimbulkan disonansi komunikasi. Humor atau gaya santai dapat membangun kedekatan dalam situasi tertentu, tetapi berpotensi dipersepsikan negatif apabila digunakan tanpa mempertimbangkan sensitivitas isu. Karena anggota DPR merupakan representasi institusional di mata masyarakat, perilaku komunikasi individu juga dapat memengaruhi persepsi terhadap lembaga yang diwakilinya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa respons anggota DPR terhadap isu tunjangan rumah memperlihatkan kegagalan komunikasi publik yang bersifat menyeluruh, terutama pada dimensi retorika kehumasan. Kegagalan tersebut tampak dari runtuhnya kredibilitas komunikator, ketika pernyataan yang disampaikan tidak mencerminkan sikap representatif, tidak menunjukkan kepekaan terhadap situasi sosial, dan tidak menampilkan karakter yang layak dari seorang pejabat publik. Kredibilitas yang melemah ini membuat setiap pesan kehilangan daya persuasinya, karena publik tidak lagi melihat komunikator sebagai figur yang layak dipercaya.

Ketiadaan empati menjadi aspek paling menonjol dalam kegagalan retorika. Dalam situasi ketika masyarakat sedang mempertanyakan keadilan dan mengekspresikan kekecewaan, respons yang muncul tidak menunjukkan pengakuan terhadap perasaan tersebut. Tidak ada upaya untuk meredakan ketegangan, tidak ada pengakuan terhadap keresahan publik, dan tidak ada kesediaan untuk memahami perspektif masyarakat. Ketika empati absen, komunikasi kehilangan kemampuan dasarnya untuk membangun kedekatan emosional, sehingga jarak antara lembaga dan publik semakin melebar.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Argumentasi yang disampaikan anggota DPR juga tidak mampu menjawab inti persoalan. Penjelasan yang diberikan cenderung bersifat pembelaan diri, tidak relevan dengan pertanyaan publik, atau tidak didukung oleh penalaran yang kuat. Dalam beberapa kasus, argumen justru memperlihatkan ketidaktepatan logika yang semakin merusak persepsi publik. Ketika argumentasi tidak diarahkan untuk membangun pemahaman, komunikasi berubah menjadi monolog yang tidak memiliki daya jelaskan.

Keseluruhan temuan ini memperlihatkan bahwa respons anggota DPR tidak selaras dengan prinsip kehumasan yang menuntut empati, tanggung jawab, transparansi, dan sensitivitas terhadap konteks sosial. Ketidaksesuaian ini membuat komunikasi publik tidak hanya gagal mencapai tujuannya, tetapi juga memperburuk citra lembaga. Pada akhirnya, krisis retorika ini berkembang menjadi krisis legitimasi, karena publik tidak lagi mempercayai kata-kata pejabat publik, tidak merasa dihargai, dan tidak melihat adanya keselarasan antara peran lembaga dan perilaku komunikatornya.

Saran yang muncul dari penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk memulihkan kembali fungsi komunikasi publik lembaga legislatif, terutama dalam situasi ketika sensitivitas sosial sedang tinggi dan kepercayaan publik berada pada titik rapuh seperti Penguatan Kompetensi Komunikasi Pejabat Publik, Penataan Ulang Standar Komunikasi Institusional, Penguatan Fungsi Kehumasan sebagai Penjaga Sensitivitas Publik, Pengembangan Respons Komunikasi yang Berorientasi pada Dialog, Penegasan Tanggung Jawab Representatif.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.

Alhabash, Saleem, dan Anna R. McAlister. (2015). Redifining Virality in Less Broad Strokes: Predicting Viral Behavioral Intentions from Motivations and Uses of Facebook and Twitter. *New Media and Society*. 17(8). 1317-1339. *https://doi.org/10.1177/1461444814523726*

Amrihani, Haresti Asysy. (2021). Retorika Deliberative: Komunikasi Marah-marah Pejabat di Ruang Publik. *Jurnal Pewarta Indonesia*. 3 (2), 124-131, http://dx.doi.org/10.25008/jpi.v3i2.87

Antara News [@antaranews]. (2025, August 22). *Joget viral Eko Patrio ala sound horeg* [Video]. TikTok. https://www.tiktok.com/@antaranews/video/7541309456471051526

BBC News Indonesia (bbc.com). (2025, Agustus 25). *Demo '25 Agustus' Tolak Tunjangan Anggota DPR Ricuh, Dasco: Tunjangan Rumah Rp. 50 Juta Dihentikan*. BBC News Indonesia. https://www.bbc.com/indonesia/articles/cr5rj1pv1ppo

Cangara, H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Depok: Rajawali Pers.

CNN Indonesia. (2025, Agustus 22). *Sahroni balas kritik desak bubarkan DPR: Mental orang tolol sedunia*. CNN Indonesia. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250822195736-32-1265453/sahroni-balas-kritik-desak-bubarkan-dpr-mental-orang-tolol-sedunia

CNN Indonesia [@cnnindonesia]. (2025, August 20). *Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menjelaskan bahwa tunjangan rumah Rp50 juta didasarkan pada biaya kontrakan atau kos di sekitar Gedung DPR/MPR* [Video]. TikTok.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

https://www.tiktok.com/@cnnindonesia/video/7540592700198784263

Cohen, H. (2014). *The History And Theory Of Rhetoric: An Introduction (5th Ed.)*. London: Pearson.

Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches (3rd Ed.)*. California: Sage Publications.

Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2011). *Effective Public Relations*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Deza, A., & Parikh, D. (2015). Understanding Image Virality. *In Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*. 1818–1826. *https://doi.org/10.1109/CVPR.2015.7298780*

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.). (2005). *The Sage Handbook Of Qualitative Research (3rd Ed.)*. California: Sage Publications.

Effendy, Onong Uchjana. (2019). *Ilmu komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Fauzan, Umar. (2022). Discourse Analysis in the Speeches of Indonesian Parliamentarians about Handling COVID-19. *Eurasian Journal of Applied Linguistics, 8(2). 56-65. https://eric.ed.gov/?id=EJ1374607*

Hapsari, Natalia Endah., Dede Fatinova., & Fariz Ardan. (2025). Analisis Komunikasi Persuasif Capres 2024 Dalam Debat KPU (Kajian Retorika Aristoteles). *CITIZEN: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(1), 165–175. *https://journal.das-institute.com/index.php/citizen-journal*

Iriantara, Yosal. (2007). *Community Relations: Konsep dan Aplikasinya*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Kriyantono, Rachmat. (2012). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media

Kriyantono, Rachmat. (2014). *Teori-teori Public Relations Perspektif Barat dan Lokal: Aplikasi Penelitian dan Praktik.* Jakarta: Kencana.

Kompas [Kompastv]. (2025, Agustus 26). [Full] Tunjangan Fantastis DPR Jadi Sorotan Publik, Ini Kata Anggota FPPR. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=ORBKwto4X0s&t=19s

Kompas [KompasTv Jember]. (2025, Agustus 21). Tunjangan Rumah DPR Rp.50 Juta Dikritik, 87% Warganet Tolak Kebijakan. [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=reV7l_BjJA4

Kumparan News. (2025, Agustus 20). *Cerita Sahroni Pakai Uang Tunjangan Rumah Dinas DPR Rp 50 Juta Buat Bantu Rakyat*. Kuparan. *https://kumparan.com/kumparannews/cerita-sahroni-pakai-uang-tunjangan-rumah-dinas-dpr-rp-50-juta-buat-bantu-rakyat-25h4g7YUrkt/full*

Kurniadi, D. (2020). *Retorika: Teori Dan Praktik Komunikasi Persuasif*. Jakarta Penerbit Andi.

Lestari, Nancy Ugi., Bambang Wibisono, & Andang Subaharianto. (2015). Diksi Dan Gaya Bahasa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014–2019. *Jurnal Publika Budaya*, 1(1), 1–19.

Lucas, Stephen E. (2020). *The Art of Public Speaking (Thirteenth Edition)*. New York: McGraw-Hill.

McNair, B. (2018). *An Introduction To Political Communication (6th Ed)*. New York:

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

JURNAL ILMIAH MUQODDIMAH:
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Vol. 10 No. 4 November 2026
E-ISSN : 2598-6236 (Media Online)
http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/muqoddimah
DOI : https://doi.org/10.31604/jim.v10i4.2026

Routledge.

Mshvenieradze, T. (2013). *Logos, ethos and pathos in political discourse*. Theory and Practice in Language Studies*, 3*(11), 1939–1945.

Mucharam, A. (2022). *Membangun komunikasi publik yang efektif*. *IKON: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 27(1), 71–81.

Nasrullah, Rulli. (2016). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Njuki, Emmanuel, dan Hmphrey Kirimi Ireri. (2021). Positive and Negative Politeness Strategies Used by Kenya's Members of National Assembly. *International Journal of Advanced Science and Technology*. 8(8), 1-20. *https://doi.org/10.4236/oalib.1107690* https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=111547

Official iNews [@officialinews]. (2025, Agustus 30). Uya Kuya Muncul Minta Maaf Kepada Raykat: Beri Saya Kesempatan. [Video]. Tiktok. https://vt.tiktok.com/ZSHVyc726/

Official iNews [@officialinews]. (2025, August 23). *Bela tunjangan rumah DPR hingga curhat macet, Nafa Urbach minta maaf #shorts* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/shorts/irjabBW-RX0

On Rhetoric. (2007) Aristotle. New York: Oxford University Press.

Priatna, Achmad Nashrudin. (2022). Wacana Politik pada Pidato Anggota Parlemen Indonesia tentang Penanganan Covid 19. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*. 2(2), 55-74.

Pujileksono, Sugeng. (2016). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif (Edisi 2)*. Malang: Intrans Publishing.

Rajiyem. (2025). Sejarah dan Perkembangan Retorika. *Jurnal Humaniora*, 17(2), 142–153.

Richard, I.A. (1936). *The Philosophy of Rhetoric*. New York: Oxford University Press.

Ruslan, Rosady. (2012). *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Silviani, Irene. (2020). *Public Relations Sebagai Solusi Komunikasi Krisis*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.

Street, J. (2004). *Celebrity Politicians: Popular Culture And Political Representation*. *The British Journal of Politics and International Relations*, 6(4), 435–452.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Telusuk [@telusuk.id]. (2025, August 20). *Usai diserang netizen, Uya Kuya akhirnya klarifikasi masalah videonya joget di sidang MPR* [Video]. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DNkxOnkvm6s/

Tempo [@tempodotco]. (2025, August 25). *Ahmad Sahroni: Hanya orang tolol yang ingin membubarkan DPR* [Video]. Instagram. https://www.instagram.com/reel/DNw7_piXngJ/

Van Dijk, J., & Poell, T. (2013). Social Media And Political Participation: The Digital Transformation Of Political Activism. *Digital Journalism*, 1(1), 1–18. *https://doi.org/10.1080/21670811.2012.712627*

West, Richard, dan Lynn H. Turner. (2010). *Introducing Communication Theory: Analysis and Application (Fourth Edition)*. New York: McGraw-Hill.

Yulianita, N. (2007). *Public Relations*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Copyright © 2026 The Author(s). Published by *Fisipol – UMTS Press*.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.